

# 6

*by* Kadek Wiwik6

---

**Submission date:** 17-Jul-2020 12:46PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1358527646

**File name:** 5.\_2009\_Penelitian\_Mandiri.pdf (1.26M)

**Word count:** 9397

**Character count:** 60928

**LAPORAN HASIL PENELITIAN MANDIRI**



**PENYUSUNAN STRATEGI KEBIJAKAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
BERPERSPEKTIF GENDER**

**Oleh ;  
Kadek Wiwik Indrayanti, SH. MSc**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG  
TAHUN 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Penyusunan <sup>32</sup> Strategi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berspektif Gender di Lingkungan Pemkot Malang
2. Ketua Peneliti
  - 2.1 Data Pribadi
    - a. Nama Lengkap : Kadek Wiwik Indarayanti, SH. MSc
    - b. Jenis Kelamin : Perempuan
    - c. NIP/ Gol : 121/ FH
    - d. Strata/ Jab Fungsional : S2 / Lektor Kepala
    - e. Jabatan Struktural : -
    - f. Fakultas / Jurusan : Hukum/ <sup>42</sup> Hukum Perdata
    - g. Bidang Ilmu : Hukum
    - h. Alamat Kantor : Jalan Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
    - i. <sup>22</sup> Telp/Faks/ E-mail : 0341- 568395/ 0341- 581056/ [info@unmer.ac.id](mailto:info@unmer.ac.id)
    - j. Alamat rumah : Jalan Bukit Dieng A 2- 8 Malang
    - k. Telp : 08125293315
  - 2.2. Mata kuliah yang diampu dan Jumlah SKS
    - a. Mata Kuliah : Sosiologi Hukum 2 Sks
    - b. Mata kuliah : <sup>36</sup> Hukum dan HAM 2 Sks
    - c. Mata Kuliah : Metode Penelitian Hukum 2 SKs
  - 2.3. Penelitian Terakhir
    - a. Judul Penelitian : Pola Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Lokal Di Kota Malang 2002.
    - b. Judul Penelitian : Persepsi Aparat Penegak Hukum Perempuan dalam Kasus Pemerkosaan (Studi di wilayah Malang) 2004.
    - c. Judul Penelitian : Persepsi Para Guru Tentang Konvensi Hak Anak (Studi Di Kecamatan Klojen Malang) 2006.
3. Jangka Waktu Penelitian : 1 Tahun
4. Lokasi Penelitian : Di Lingkungan Pemkot Malang
5. Pembiayaan : Mandiri

Malang, November 2009

Ketua Peneliti

Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.  
NIP. 121/FH



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Supriyadi, S.H., M.H.  
NIP. 367/FH



Menyetujui  
Ketua LLPM  
Universitas Merdeka Malang

Dr. Harmono, M.Si.  
NIP. 571/FE

## DAFTAR ISI

Judul Penelitian .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Lingkup Permasalahan .....	2
1.3 Tujuan .....	3
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>4</b>
2.1. Pengantar Sejarah Gender Mainstreaming/ Pengarusutamaan Gender (PUG) .....	4
2.2. Mengapa PUG (Gender Mainstreaming) diperlukan? .....	7
2.3. Apa keuntungan menyelenggarakan PUG ? .....	7
2.4. Gender Mainstreaming (GM) sebagai suatu strategi dalam praktek .....	7
2.5. Sosiologis .....	11
2.6. Aspek Yuridis .....	13
<b>BAB III. METODOLOGI DAN RENCANA KERJA</b> .....	<b>14</b>
3.1 Sampel Kajian .....	14
3.2 Integrasi Terhadap Visi dan Misi Kota Malang .....	14
3.3. Metodologi Dan Rencana Implementasi .....	16
3.3.1. Tahap Persiapan .....	16
3.3.2. Tahap Pelaksanaan .....	17
3.4. Tahap Analisa .....	17
3.5 Outcome Yang Diharapkan .....	18
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>19</b>
4.1. Kondisi Penerapan Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender Pada Pemerintah Kota Malang .....	19
4.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait .....	30
4.3. Permasalahan Umum .....	44
4.4. Permasalahan Pada SKPD-SKPD Terkait .....	44
4.5. Manfaat Kajian Bagi Setiap SKPD/ Pemerintah Kota Malang .....	45
4.6. Outcome Yang Diharapkan .....	45
4.7. Kendala Implementasi .....	45
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	<b>47</b>
5.1 KESIMPULAN .....	47
5.2 REKOMENDASI .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. CURICULUM VITAE	

## PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan kemiskinan sampai saat ini masih menjadi isu sentral di Indonesia. Krisis ekonomi memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya angka kemiskinan diseluruh wilayah Indonesia. Hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penduduk miskin pada tahun 2004 sebanyak 36.1 juta jiwa dan pada tahun 2005 mencapai 62 juta jiwa. Walaupun begitu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menjalankan program-program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) antara lain di bidang ketahanan pangan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, program JPS Bidang Sosial, bidang penciptaan lapangan kerja produktif, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Di tingkat propinsi sejak tahun 2002 Pemerintah Propinsi Jatim telah menetapkan Program Gerdutaskin dalam menanggulangi kemiskinan. Namun kenyataannya masalah kemiskinan masih saja belum berubah. Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran perlunya ditemukan strategi baru dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan.

Masalah Kemiskinan menjadi agenda pembangunan yang semakin rumit dan kompleks untuk dipecahkan. Berbagai pendekatan dan strategi pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa masalah kemiskinan telah terselesaikan secara tuntas bahkan justru semakin kompleks dan meluas. Penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah daerah, Kota menjadi pelaku strategis untuk langsung melakukan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Adapun dasar yang dipakai

untuk menyusun Pedoman penyusunan kerangka dan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Landasan Idiil : Pancasila dan UUD 1945
2. Landasan Konstitusional : GBHN tahun 2004-2009
3. Landasan Operasional :
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. UU No.12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - e. Instruksi Presdiden (INPRES) nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - f. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota dan Kabupaten;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan; dan
  - h. Surat Edaran (SE) Depdagri dan Otda RI Nomor 050/1240/ii/Bangda.

Pasca kenaikan BBM bulan Oktober 2005 tercatat jumlah keluarga miskin di Kota Malang mengalami kenaikan 12.16 % dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tanggal peraturan tanggal 4 Juli 2006 tercatat penduduk miskin di Kota Malang berjumlah 24.350 jiwa tahu 13.69 %. Sedangkan bila diukur dari rumah tangga miskin di kota Malang yang sangat miskin sebanyak 2166 RT dan miskin sebanyak 6713 RT dan hampir miskin sebanyak 15.393 RT. Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran perlunya ditemukan strategi baru dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan.

Program-program pengendalian kemiskinan yang telah berjalan selama ini adanya kecenderungan sifat program yang tidak berkesinambungan, orientasi kebijakan yang berifat terpusat. Sedangkan di Kota Malang untuk menanggulangi kemiskinan tersebut maka perlu ditemukan suatu strategi baru yang diperoleh melalui lintas sektoral untuk mencegah terjadinya tumpang tindih. Proses penanggulangan kemiskinan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## **1.2. LINGKUP PERMASALAHAN**

Adapun lingkup kegiatan dalam kajian ini adalah melakukan beberapa hal yaitu:

1. Inventarisasi dan kajian faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di kota Malang dilihat dari perspektif gender;
2. Studi inventarisasi dan kajian program dan proyek pengentasan kemiskinan pada setiap bidang/sektor yang dikelola oleh Pemkot Malang;
3. Mengkaji pola koordinasi intensif dinas terkait dalam rangka definisi program yang menyangkut kewenangan dan relevansi (keterkaitan), dan
4. Penyusunan kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan berperspektif gender.

## **1.3 TUJUAN**

Tujuan dari Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender adalah untuk memudahkan Pemerintah Kota dalam menyusun program/proyek pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat, perempuan dan laki-laki meningkat.

## KAJIAN PUSTAKA

**2.1. Pengantar Sejarah Gender *Mainstreaming* / Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pada tahun 1995 pada Konferensi Internasional Perempuan keempat yang diadakan di Beijing, konsep *gender mainstreaming* dibentuk sebagai persetujuan strategi internasional untuk pemerintah dan organisasi untuk mempromosikan kearah sensitif pada isu-isu gender di semua aksi di semua level termasuk aspek peraturan, kebijakan-kebijakan dan program-program. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*, PUG) yang secara global telah diterima sebagai suatu strategi dan pendekatan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Target dari Pengarusutamaan Gender ini adalah agar kebijakan dan program / kegiatan yang dihasilkan oleh pemerintah menjadikan gender sebagai arus utama, sehingga sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dibuat analisis yang berkaitan dengan dampak kebijakan / program / kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari paradigma *good governance*, di mana tata kelola yang baik dalam pemerintahan harus dipertajam dengan analisis gender, sehingga hasil yang diperoleh telah mempertimbangkan perempuan dan laki-laki dalam kebijakan / program / kegiatan pembangunan.

*Gender mainstreaming* adalah suatu proses memperluas pelaksanaan untuk perempuan miskin dan laki-laki pada setiap rencana aksi, termasuk peraturan, kebijakan dan program-program. *Gender mainstreaming* merupakan suatu strategi untuk untuk membantu minat perempuan dan juga laki-laki dan pengalaman-pengalaman merupakan bagian yang terintegrasi mulai pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat memberikan keuntungan pada perempuan dan laki-laki. Tujuan utama untuk mencapai *gender mainstreaming* adalah *gender equality* (*Gender and Water Development Report*. 2003, hal 30 dan *UN Economic and Social Council* 1997). Satu pelajaran penting tentang



*gender mainstreaming* adalah pertama: terletak pada pentingnya komitmen politik tingkat atas. Pentingnya mengintegrasikan suatu perspektif gender di semua kebijakan, program-program dan proyek yang berhubungan dengan air dan sanitasi, yang kedua adalah hubungan antara transformasi internal dan eksternal dan yang ketiga adalah mekanisme institusi (Morna, 200, hal 8).

Dalam kasus di Indonesia, istilah PUG muncul pada Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional sebagai suatu persoalan yang lintas sektoral. Isu ini kemudian dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG yang merupakan gebrakan dari kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di era Kementrian Khofifah Indar Parawansa. Inpres ini menginstruksikan kepada seluruh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten / kota untuk melakukan PUG dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG merupakan suatu strategi yang menjadi bagian yang terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, sebagai salah satu dari delapan butir isu *Millenium Development Goals* (MDGs).

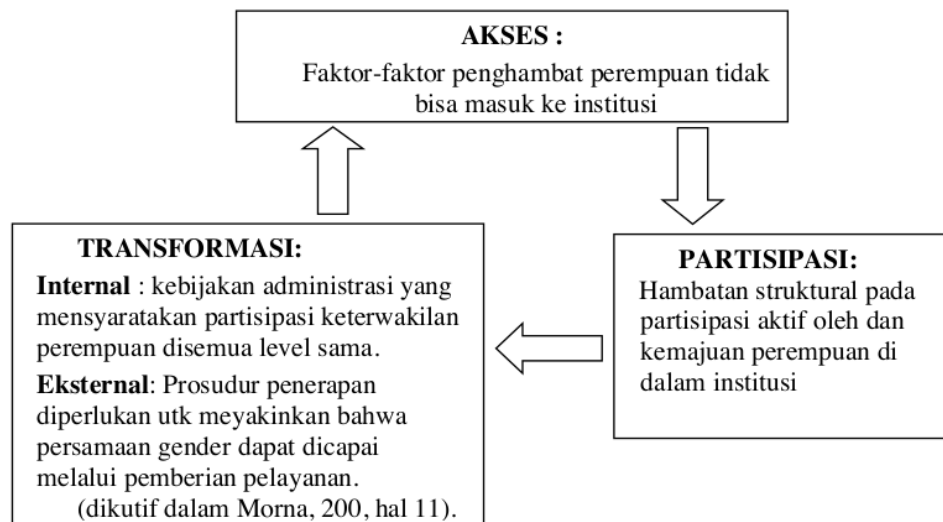
Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan apakah sudah begitu urgen adanya kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan? Bukankah program-program baik dari Pusat, Propinsi dan akhirnya Kota juga telah dilakukan? Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran perlunya ditemukan strategi baru dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan. Proses penanggulangan kemiskinan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan SKPD terkait. Hal ini dimaksudkan agar dapat dioperasionalkan secara efektif dan mengena pada sasaran kehidupan masyarakat miskin di Kota Malang. Namun hasilnya masih belum maksimal. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada belum mengintegrasikan pengarusutamaan gender di dalamnya. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hasil dari Konferensi Wanita se-Dunia di

Beijing 1995. Deklarasi dan Landasan Aksi terkenal dengan “*Platform of Action*” dengan 12 bidang kritis. Konferensi Beijing mengharuskan tiap pemerintahan di dunia melakukan “*Gendermainstreaming*” atau pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan yang mencakup antara lain: Perempuan dan Kemiskinan. Studi yang mendalam pada aspek substansi kebijakan dan utamanya pada tataran implementasi suatu program pengentasan kemiskinan apakah PUG sudah terintegrasi di dalamnya? Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu mengintegrasikan PUG yang dapat dipakai sebagai bahan rujukan bagi dinas/SKPD/instansi yang melakukan program penanggulangan kemiskinan.

Pentingnya pengintegrasian PUG kedalam setiap kebijakan, program/proyek dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

- 1) Secara teori dan realitas Pemerintah Kota Malang belum memiliki kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender.
- 2) Secara fakta tingkat kemiskinan meningkat dan kelompok masyarakat yang paling menderita adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Menurut Thenjiwe Mtintso, seorang aktivis gender dan Sekretaris Nasional General Kongres Afrika menguraikan dan mengembangkan *framework* untuk menganalisis transformasi gender kedalam institusi sebagai berikut:



## 2.2. Mengapa PUG (*Gender Mainstreaming*) diperlukan?

<sup>5</sup> Kebijakan dan pelayanan publik serta program & perundang-undangan yang adil & responsive gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. PUG merupakan upaya utk menegakkan hak-hak perempuan & laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama & penghargaan yang sama dimasyarakat. PUG mengantar kepada pencapaian KKG dan karenanya PUG meningkatkan Akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik, ekonomi suatu bangsa.

## 2.3. Apa keuntungan menyelenggarakan PUG ?

Dapat diidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan:

- Memperoleh **akses** yang sama kepada Sumber Daya Pembangunan;
- **Berpartisipasi** yang sama dlm proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan;
- Memiliki **kontrol** yang sama atas sumber daya pembangunan; dan
- Memperoleh **manfaat** yang sama dari hasil pembangunan.

## 2.4. Gender Mainstreaming (GM) sebagai suatu strategi dalam praktek mencakup empat prinsip langkah yaitu ;

**Langkah 1: data pilah berdasarkan jenis kelamin dan informasi analisa gender**

Mengumpulkan data gender terpilah sangat mendasar untuk membedakan perbedaan kebutuhan, kepentingan dan prioritas dalam pengaturan sumber sumber air. Semua informasi dibutuhkan untuk menentukan perbedaan dan ketidak samaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan: mengambil problem dengan memperhatikan isu-isu gender secara serius, merancang kebijakan-kebijakan dan rencana yang memenuhi kebutuhan kedua jenis kelamin, dan memonitor perbedaan dampak kebijakan, proyek dan komitmen pendanaan <sup>10</sup> pada laki-laki dan perempuan.

## **Langkah 2: Perempuan dan laki-laki mempengaruhi pengembangan agenda**

Adalah sangat krusial bahwa perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan yang lainnya memiliki suara kuat untuk meyakinkan pandangan mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam mengambil keputusan baik di level masyarakat maupun di level atas pada suatu penataan organisasi dan meyakinkan bahwa laki-laki dan perempuan berkomitmen melakukan promosi gender sensitif dan mempengaruhi pengambilan kebijakan.

## **Langkah ke 3: Hubungi aksi tertentu untuk mempromosikan persamaan gender.**

*Gender mainstreaming* merupakan suatu strategi mempromosikan sensitif gender dan memberdayakan perempuan. Aksi dilakukan untuk meningkatkan pengaruh persamaan, kesempatan untuk laki-laki dan perempuan harus dibagi pada pembagian data terpilah secara khusus dan informasi analisa gender serta pemahaman yang jelas tentang prioritas laki-laki dan perempuan.

## **Langkah 4: Capacity building dan perubahan organisasi**

*Gender mainstreaming* sebagai suatu strategi organisasi untuk mempromosikan persamaan gender-tergantung pada ketrampilan, pengetahuan, dan komitmen staf yang ikut dalam manajemen dan pelaksanaan (Derbyshire, 2002 “ *Gender Manual: Practical Guidelines for Development Policy Makers and Practitioners*”, DFID).

<sup>1</sup> Komitmen pemerintah Indonesia dalam *Millenium Development Goals* untuk mencapai beberapa target pembangunan antara lain, pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender dan ketahanan pangan, telah lama diganggu. <sup>1</sup> Untuk mewujudkan target MDG's tersebut, strategi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dikembangkan bermanfaat bagi kelompok sasaran laki-laki dan perempuan adalah Strategi Pengarusutamaan Gender atau *Gender Mainstreaming* yaitu alat yang digunakan agar kebutuhan, pengalaman, aspirasi kelompok

perempuan dan laki-laki dapat diakomodasi, selain itu strategi PUG dapat digunakan untuk merumuskan intervensi yang tepat untuk mengatasi persoalan, pemenuhan kebutuhan kelompok laki-laki dan perempuan yang menjadi sasaran langsung pembangunan. Sehingga kesenjangan yang dialami kelompok laki-laki dan perempuan (dalam konteks ini adalah pertanian) dapat dikurangi bahkan ditiadakan.

Contoh yang dilakukan dalam proyek pertanian misalnya, dimana kelompok sasarannya adalah petani di lahan kering, komitmen pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender tertera dalam dokumen pelaksanaan program, dimana dalam dokumen tersebut telah tertera bahwa komitmen menuju kesetaraan yang diterjemahkan dalam *entry point* pemberdayaan masyarakat melalui organisasi. Pemberdayaan yang dimaksud adalah menguatkan kapasitas masyarakat dalam wadah kelompok dalam hal ini ada tiga tahapan kelompok yang ada dalam dampingan. Komitmen dalam dokumen itu kemudian mencakup bagaimana PUG dilaksanakan dalam tahapan pelaksanaan program, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi.

Dalam fase perencanaan misalnya dilakukan penilaian kebutuhan terpilah antara kelompok laki-laki dan perempuan, sehingga kebutuhan yang diterjemahkan dalam pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Alat yang dapat digunakan dalam proses perencanaan ini bisa melalui alat analisa gender baik itu Harvard, Moser, sampai PROBA (*Problem Based Analysis*) dan GAP (*Gender Analysis Pathway*), yang mensyaratkan data terpilah dan analisa gender dalam setiap komponen kegiatan yang akan dikembangkan.

Fase pelaksanaan, melalui bentuk pemberdayaan masyarakat dalam wadah organisasi/kelompok yang ditumbuhkembangkan tersebut terdiri dari kelompok perempuan dan laki-laki. Suatu awal yang baik untuk memulai komitmen pelaksanaan pengarusutamaan gender, dimana kelompok petani perempuan yang menjadi sasaran yang dalam program, kegiatan maupun kebijakan pembangunan pada umumnya seringkali di

marginalkan, padahal dalam kondisi riil, kelompok petani perempuan memiliki peran dan fungsi dalam proses pertanian yang signifikan, demikian pula posisinya dalam melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran.

Dengan mendorong tumbuhnya kelompok perempuan dan laki-laki diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik mereka. Misalnya kelompok perempuan yang memiliki potensi dalam pengembangan usaha mikro, dimana peningkatan kapasitas dalam hal akomoditas yang dapat dihasilkan. Kemudian kelompok petani laki-laki dalam program ini diuntungkan karena pengadaan saprodi menjadi lebih mudah dijalankan melalui kelompok. Hal ini penting, karena selama ini akses petani miskin terhadap alat-alat pertanian dan pendukungnya dirasakan sulit, belum lagi ketersediaan pupuk yang juga rentan dalam segi harga. Melalui kelompok alat pertanian, pupuk bisa didapatkan, jaringan pemasaran dapat dibuka.

Tidak hanya itu, melalui *entry point* pemberdayaan masyarakat dalam kelompok perempuan dan laki-laki ini, petani miskin didorong untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya mengikuti musrembang desa, serta bisa menentukan kebutuhan mereka dalam konteks pengembangan sebagai petani, baik laki-laki dan perempuan, baik itu yang sifatnya teknis, pengembangan kapasitas dan segi infrastruktur. Selain itu pembukaan ruang dan akses untuk mencapai kebutuhan strategis kelompok petani perempuan dan laki-laki.

Sebagai dasar pembangunan dan pengaturan sumber-sumber air, suatu pendekatan *sensitive gender* mencoba menganalisa:

1. Bagaimana laki-laki dan perempuan menggunakan sumber air dan untuk kegunaan apa?
2. Siapa yang menentukan kebijakan pada semua level?
3. Siapa yang diuntungkan atas proyek dan program, seperti pengetahuan, pekerjaan dan pelatihan.
4. Siapa yang diuntungkan dari pembangunan sumber air dan siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol?

5. Apakah semua perempuan dari berbagai latar belakang (umur, kekayaan, agama, suku) memperoleh keuntungan secara adil?

**5**  
**APAKAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PROYEK/KEGIATAN PEMBANGUNAN SAAT INI SUDAH RESPONSIF GENDER?**

- ⇒ PERENCANAAN ?
- ⇒ PELAKSANAAN ?
- ⇒ PEMANTAUAN ?
- ⇒ EVALUASI ?
- ⇒ AKSES ?
- ⇒ PARTISIPASI ?
- ⇒ KONTROL ?
- ⇒ MANFAAT ?

## 2.5. SOSIOLOGIS

Kondisi kemiskinan di Kota Malang pasca kenaikan BBM bulan Oktober 2005 tercatat jumlah keluarga miskin di Kota Malang mengalami kenaikan 12.16 % dan berdasarkan data BPS Kota Malang tanggal peraturan tanggal 4 Juli 2006 tercatat penduduk miskin di Kota Malang berjumlah 24.350 jiwa atau 13.69 %. Sedangkan bila diukur dari rumah tangga Miskin di kota Malang yang Sangat Miskin sebanyak 2166 RT , Miskin sebanyak 6713 RT dan Hampir Miskin sebanyak 15.393 RT. Dilihat dari jumlah rumah tangga Miskin berada di kecamatan Kedungkandang (17,03%), kemudian diikuti Kecamatan Sukun, Klojen dan Blimbing masing-masing 15,53%; 12,33%; 12,02%; 10,95% (Biro Pusat Statistik Kota Malang, 2006).

Dalam kebijakan berperspektif gender sasarannya adalah mempertimbangkan pengalaman-pengalaman, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda antara kedua jenis kelamin dan <sup>51</sup> memberikan kesempatan, akses yang sama antara laki-laki dan perempuan.



Berdasarkan hasil kajian dari Bappeda Kota Malang kerjasama dengan Universitas Brawijaya (2006) secara umum permasalahan pada kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang selama ini sudah ada hanya yang perlu mendapat perhatian adalah perlu adanya kebijakan yang komprehensif guna penanggulangan kemiskinan yang melibatkan masyarakat miskin itu sendiri. Sedangkan kebijakan berperspektif gender secara eksplisit belum ada. Selanjutnya, belum adanya sinergi antar satuan penanggulangan kemiskinan daerah dan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin secara maksimal bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Berikut pula HASIL KAJIAN SCBD (Indrayanti, 2009) menunjukkan bahwa:

1. Dari semua dinas / SKPD yang menjadi obyek kajian, dinas BKBP yang memiliki dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan bagi perempuan dan anak. Kewenangan ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Sedangkan Bappeda bertugas melakukan kajian tentang strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial melaksanakan program untuk masyarakat umum yang memiliki permasalahan. Sedangkan dinas-dinas yang lainnya melaksanakan program sebatas yang tertera dalam Tupoksinya. Dengan kata lain koordinasi dalam pelaksanaan program masih sendiri-sendiri.
2. Keterkaitan masing-masing instansi / dinas / SKPD dalam melaksanakan program dan relevansinya menunjukkan bahwa dari semua instansi yang menjadi obyek kajian ternyata tidak semua memiliki program penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender. Untuk itu pemahaman tentang konsep gender dan PUG dikalangan PNS perlu ditingkatkan dengan melakukan diklat-diklat bagi semua eselon agar dalam pembuatan kebijakan dan program-program berorientasi gender. Sehingga hubungan antar instansi/SKPD satu dengan yang lainnya belum komprehensif baik dalam membuat dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.



3. Penentuan dinas/SKPD yang akan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan relevansi tupoksinya perlu ditinjau kembali. Disamping BKBPM, dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Kesra, Dinas Pendidikan dan Kesehatan seharusnya dalam tupoksinya lebih ditekankan untuk melakukan program-program pengentasan kemiskinan yang berspektif gender.
4. Persepsi tentang makna Miskin dan Penyebab kemiskinan dari masyarakat dan SKPD/dinas ternyata ada persamaannya, hal ini menunjukkan hal yang positif terutama dalam pembuatan materi suatu kebijakan dan program sudah tidak ada yang tumpang tindih lagi. Atau dengan kata lain program sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

#### **2.6. ASPEK YURIDIS**

Secara Yuridis Pemerintah Kota Malang belum memiliki peraturan yang dipakai sebagai dasar oleh dinas-dinas/SKPD untuk membuat dan melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Walaupun begitu program-program penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat umum sudah dilakukan oleh beberapa dinas yang terkait melalui dana APBN maupun dana dari Pemkot Malang. Peraturan yang dibutuhkan oleh Pemkot Malang adalah bisa setingkat Perda atau Perwal. Sementara ini Dinas yang melakukan tugas pemberdayaan pada perempuan dan anak diserahkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota pada Dinas BKBPM termasuk program-program penanggulangan kemiskinan.

## BAB III METODOLOGI DAN RENCANA KERJA

### 3.1 Sampel Kajian

Yang dijadikan sampel dalam kajian adalah institusi yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan di Kota Malang adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keselamatan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra, Kecamatan, dan Kelurahan.

### 3.2 Integrasi Terhadap Visi dan Misi Kota Malang

Kajian ini ternyata merupakan salah satu implementasi dari visi dan misi Kota Malang yang dapat dilihat dibawah ini:

- A. Adapun visi Kota Malang adalah : “ Terwujudnya Kota Malang yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan”.
1. Mandiri berarti mampu membiayai sendiri berdasarkan optimalisasi penggalan, pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan sumber daya manusia maupun potensi daerah yang lainnya sehingga mampu melakukan perubahan mekanisme perencanaan dan pengendalian yang lebih bersifat bottom-up.
  2. Berbudaya berarti kota yang tetap mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai Kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial, nilai-nilai etika dan budi pekerti masyarakat Kota Malang serta nilai-nilai pendidikan.
  3. Sejahtera berarti bahwa keseluruhan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Malang diarahkan pada pola kemitraan antara pelaku penanggulangan kemiskinan dan para orang miskin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kota baik materiil maupun spiritual.

4. Berwawasan Lingkungan berarti bahwa pelaksanaan pembangunan kota tetap diupayakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman Kota Malang.
5. Arti kata “Visi” diatas adalah sebagai berikut :

“Berbudaya adil, artinya bahwa masyarakat Kota Malang mempunyai nilai-nilai budaya etos kerja yang tinggi. Sejahtera yang berkeadilan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, artinya bahwa pembangunan di Kota Malang didasarkan atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang merata. Dilandasi iman dan taqwa melalui kebersamaan dalam pembangunan semesta terpadu, artinya adalah bahwa seluruh pelaksanaan otonomi daerah di Kota Malang dilakukan bersama masyarakat dengan mengedepankan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

54

#### B. Pernyataan Misi

Misi pemerintah Kota Malang dalam penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan masukan berbagai pihak dalam berbagai pertemuan dan diskusi. Adapun misi pemerintah Kota Malang dalam melakukan penanggulangan kemiskinan, antara lain :

1. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin di Kota Malang.
2. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
3. Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada Negara dengan pondasi sistem kehidupan ekonomi, sosial, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial dalam ikut serta menerbitkan persatuan dan kesatuan demi kerukunan Kota Malang.

4. Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada: wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otomoni daerah, iman dan taqwa, budi pekerti, hak asasi manusia dan keadilan sosial.
5. Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistic, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan rakyat.
6. Menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk posisi geografis dan sumberdaya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat Kota Malang dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

### 3.3. METEDOLOGI DAN RENCANA IMPLEMENTASI

Adapun metode yang dipakai dalam melakukan kajian ini <sup>31</sup> adalah sebagai berikut:

#### 3.3.1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahap yang dilakukan yaitu :

- a. Pembuatan kuisisioner: satu materi kuisisioner yang ditujukan kepada instansi terkait dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara khusus dan satu untuk kelompok masyarakat umum yang berada di lima (5) kecamatan berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang indikator kemiskinan.
- b. Pengumpulan data sekunder: melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek

penanggulangan kemiskinan di Kota Malang yang telah dilakukan di level SKPD.

### <sup>39</sup> 3.3.2. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Penyebaran kuisisioner ke instansi terkait yaitu: <sup>23</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, <sup>9</sup> Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan, Kelurahan.
- b. Mengadakan FGD sehari dengan instansi terkait untuk memperoleh penajaman dari hasil kuisisioner yang telah dilakukan. Pada sesi FGD yang akan digelar ke para peserta adalah rencana aksi/program penanggulangan kemiskinan dari masing-masing SKPD di Kota Malang, kendala dan hambatan yang ditemui dalam melaksanakan program.

### 3.4. Tahap Analisa

Setelah data dan informasi-informasi <sup>20</sup> diperoleh maka akan dianalisis dengan menggunakan metode SWOT terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada.

Analisis mengenai <sup>9</sup> Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun rencana strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan berspektif gender. Adapun dasar analisis yang diinginkan tersebut adalah penjabaran dari visi dan misi penyelenggaraan pembangunan Kota Malang.

### **3.5 OUTCOME YANG DIHARAPKAN**

Dengan tersusunnya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berspektif gender maka program-program pengentasan kemiskinan akan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan terpadu sehingga dapat menurunkan tingkat dan jumlah masyarakat miskin diwilayah Kota Malang.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****4.1. KONDISI PENERAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERPERSPEKTIF GENDER PADA PEMERINTAH KOTA MALANG**

Setelah melakukan kajian pustaka dan melakukan penyebaran kuesioner ke instansi/SKPD yang dijadikan sampel dalam kajian ini maka dapat diuraikan bahwa tidak semua instansi/SKPD memiliki kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan apalagi yang berperspektif gender. Instansi/SKPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan ada pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) yang berkaitan langsung dengan perempuan dan anak. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial juga memiliki. Sedangkan program-program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berupa pemberdayaan yang ditujukan pada UKM dan Koperasi tidak secara khusus mengkaji dan merumuskan apakah program itu bermanfaat bagi perempuan.

Pada instansi BKBPM bidang yang melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2009 sebagai berikut: Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Raskin, Pelatihan Ketrampilan Aneka Olahan Pangan untuk Masyarakat sekitar Pabrik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Gardu Taskin. Informasi berkaitan dengan koordinasi dengan dinas terkait/SKPD dalam membuat dan melaksanakan program belum berjalan maksimal, tiap dinas/SKPD membuat dan melaksanakan program masing-masing.

Dalam membuat suatu program pengentasan kemiskinan, kajian persepsi tentang makna miskin dilakukan baik di kalangan dinas/SKPD terkait maupun masyarakat guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dari

pembuat program/kebijakan maupun yang akan diberikan program (masyarakat).

Penggalian persepsi masyarakat tentang konsep kemiskinan dan penyebab timbulnya kemiskinan informasi diperoleh dari masyarakat yang berada di 5 kecamatan dan 5 kelurahan. Berdasarkan data dari Bappeda Kota Malang Rumah Tangga (RT) Miskin menurut klasifikasi Kota Malang dikelompokkan menjadi: RT yang Hampir Miskin, RT Miskin dan RT Sangat Miskin. Berdasarkan klasifikasi tersebut diatas maka pengumpulan data tentang persepsi masyarakat ditentukan dengan memilih kelurahan berdasarkan karakteristik RT yang Sangat Miskin seperti Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang; Kecamatan Sukun, Kelurahan Pisang Candi; Kecamatan Klojen, Kelurahan Samaan; Kecamatan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi dan Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Tlogomas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat Kota Malang tentang kemiskinan sehingga dapat dipakai sebagai indikator dalam membuat kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender secara tepat.

<sup>7</sup> Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi maka penyebabnya juga bersifat multidimensi diantaranya karena faktor bencana alam seperti: kegagalan panen, etos kerja yang rendah, pendidikan dan kualitas kesehatan serta sebab struktur dan proses transaksi politik, ekonomi dan sosial budaya yang tidak adil dan memiskinkan. <sup>7</sup> Penyebab kemiskinan lainnya adalah pengaruh eksternal terhadap perekonomian Indonesia seperti yang terjadi pada tahun 1997. <sup>7</sup> Penyebab kemiskinan lainnya adalah karena terbatasnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana dasar seperti transportasi, komunikasi/informasi, pasar, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek mikro atau pendapatan ekonomi semata, namun lebih dari itu, kemiskinan pada hakekatnya berhubungan erat dengan bagaimana kebutuhan pemenuhan



hak dasar dapat terpenuhi. Indikator-indikator kemiskinan dari aspek pemenuhan hak dasar dipertegas dengan rumusan konkrit Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah (BPS, 2004);
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Pada sisi lain utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1% dibanding 82,3% pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74% (2001) penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin;
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung;
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pramuwisma;

5. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai;
6. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air;
7. Lemahnya kapasitas kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dan penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di bidang pertanian;
8. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghasilan;
9. Lemahnya jaminan rasa aman. Berkaitan dengan tingginya pengangguran dapat disimak dari sisa pencari kerja dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang (2006), Sisa pencari Kerja terdaftar laki-laki: 26703 dan perempuan: 22446. Begitu juga dengan tingkat kriminal yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Malang yang masih dibangku Sekolah Dasar sebanyak 12 orang, SLTP mencapai 13 orang sedangkan pada jenjang SLTA sejumlah 11 anak. Hal ini cukup mengawatirkan karena jenis tindak pidana yang paling banyak dilakukan adalah pencurian (2008);
10. Lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran di perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya

partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka;

11. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedang rata-rata anggota rumah tangga miskin di pedesaan adalah 4,8 orang.

Menurut hasil kajian <sup>20</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang pada tahun 2006, ada berbagai faktor penyebab kemiskinan di Kota Malang. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

1. Pendapatan

Masyarakat miskin adalah masyarakat yang pendapatannya lebih kurang sama dengan Upah Minimum Regional Kota Malang per bulan yakni sebesar Rp.584.000. Berdasar asumsi Upah Minimum Regional (UMR) maka jumlah tersebut tergolong tidak mampu memenuhi *basic needs*. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa banyak variasi dalam besaran tersebut. Misalnya status perkawinan dan jumlah anak. Oleh karenanya penetapan yang lebih tepat adalah jumlah pendapatan tersebut dilihat dari unit analisis kepala keluarga dengan jumlah anak 2 orang.

2. Rumah Tinggal dan Fasilitas Umum

Masyarakat miskin adalah seorang yang tidak mampu menempati tempat tinggal yang layak dan fasilitas umum di lingkungannya yang tidak memadai. Sehingga acuannya bukan kepemilikan tetapi kemampuan menempati. Sehingga hal ini bisa dipenuhi dengan berbagai alternatif cara. Utamanya di wilayah perkotaan, sasaran urbanisasi seperti Kota Malang ini, seringkali ditemui penduduk tidak

memiliki rumah tinggal sendiri tetapi mampu menempati rumah tinggal yang sangat layak.

### 3. Pendidikan

Masyarakat miskin adalah seorang yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan wajib 9 tahun. Kota Malang sering disebut sebagai Kota Pendidikan, ternyata masih banyak anak-anak dibawah umur yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan seperti mengamen dan mengemis di perempatan-perempatan jalan. Akan tetapi hal ini sesungguhnya dapat bersumber dari aspek budaya, tingkat pendidikan orang tua dan faktor ekonomi. Sehingga untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Malang dari aspek pendidikan ini harus dibenahi dari tiga sebab yang ada tersebut.

### 4. Kesehatan

Dari segi kesehatan yang dimaksud dengan masyarakat miskin dapat dilihat dari dua segi yaitu: *pertama* adalah seseorang yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan dengan baik, yang disebabkan faktor ekonomi, tingkat pendidikan maupun sosial budaya. *Kedua* adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara medis terbukti rentan terhadap penyakit serta mengalami kekurangan gizi yang akut. Jika golongan yang pertama lebih banyak karena faktor ekonomi, maka golongan yang kedua lebih pada keterjangkauan akses dan lokasi tinggal mereka. Semakin terpencil satu masyarakat dari pusat kesehatan, maka semakin rentan mereka terhadap penyakit dan wabah.

### 5. Sosial/Budaya

Masyarakat miskin adalah seseorang yang tidak memiliki kesadaran tentang pola dan gaya hidupnya. Disamping itu juga, terkait dengan ketidakmampuan mereka dalam mengaktualisasikan dirinya. Artinya di Kota Malang ditemukan beberapa kasus keluarga yang pola hidupnya sangat konsumtif, misalnya untuk membeli rokok, VCD, dan alat-alat tertier lainnya mampu, tetapi untuk membuat rumah yang layak dan menyekolahkan anaknya sering kali tidak mampu. Hal yang

lebih parah dari aspek ini adalah kemauan mereka untuk mengaktualisasikan diri dan berusaha untuk mendayagunakan kemampuan yang dimilikinya sangat rendah. Hal ini berkaitan juga dengan etos kerja yang rendah pula.

6. Sempitnya Akses pada Sumber Ekonomi

Salah satu hal dari sempitnya akses ke sumber ekonomi ini yang paling terasa adalah lemahnya akses pemasaran yang dapat diperoleh para pelaku industri kecil sehingga cenderung menghasilkan produk yang berdaya asing rendah. Sehingga ketika ada pelatihan dan bantuan modal yang diberikan pada industri kecil, maka mereka selalu menghadapi masalah pada tingkat pemasaran. Sumber-sumber ekonomi lainnya adalah sumber dana pembangunan serta informasi tentang berbagai peluang pasar yang potensial yang biasanya hanya dikuasai oleh segelintir elit tertentu di masyarakat.

7. Keamanan dan Keselamatan Hidup

Masyarakat miskin adalah mereka yang rentan aspek keamanan pribadi dan sosialnya, artinya pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari dan lingkungan di mana mereka tinggal tidak aman. Selain pekerjaan, kurangnya keamanan lingkungan juga cukup menonjol. Hampir setiap berita kriminal yang ada di Kota Malang seringkali terjadi di daerah-daerah yang relatif miskin.

8. Pekerjaan Tidak Tetap

Identifikasi ini memang tidak selalu tepat untuk melihat kondisi kemiskinan, khususnya di Kota Malang. Sebab semakin maju dan modern sebuah daerah maka semakin kompleks pula pekerjaan dan pendapatan masyarakatnya. Sehingga gaya hidup menerima gaji rutin per bulan sudah menjadi orientasi tunggal lagi. Akan tetapi pada kenyataannya kita masih melihat banyak kelompok masyarakat miskin yang mungkin bisa digolongkan “setengah pengangguran: dimana dikatakan pengangguran murni juga tidak karena sewaktu-waktu mereka dapat memiliki pekerjaan. Tetapi dikatakan sebagai

masyarakat bekerja juga tidak bisa karena lebih banyak menganggurnya dari pada bekerja. Kelompok masyarakat ini jumlahnya lebih banyak terutama di *slum area* di Kota Malang

Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang (Bappeda) dengan Univeristas Brawijaya (2006) tentang strategi penanggulangan kemiskinan dapat disimpulkan hasil analisis yang dilakukan sebagai berikut:

a. KEKUATAN

Ada beberapa hal yang dikategorikan sebagai kekuatan internal meliputi:

1. Komitmen pemerintah kota Malang yang sangat kuta terhadap penanggulangan kemiskinan tercermin dalam visi dan misinya.
2. Tersedianya sarana dan parsarana sebagai hasil pembangunan.
3. Tersedianya berbagai program kemiskinan yang telah ada.

b. KELEMAHAN

1. Jumlah orang miskin dikota Malang sampai tahun 2006 mencapai 24.350 atau sebesar 13.69%.
2. Rendahnya akses masyarakat miskin terhadap aspek pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
3. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap modal.
4. Masih rendahnya skill dan motivasi berusaha bagi masyarakat miskin.
5. Program kemiskinan sebagian besar masih berorientasi hanya mengurangi beban orang miskin belum sampai pada meningkatkan pendapatan orang miskin.
6. Masih rendahnya rasa keadilan dan kesetaraan gender.

c. PELUANG

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

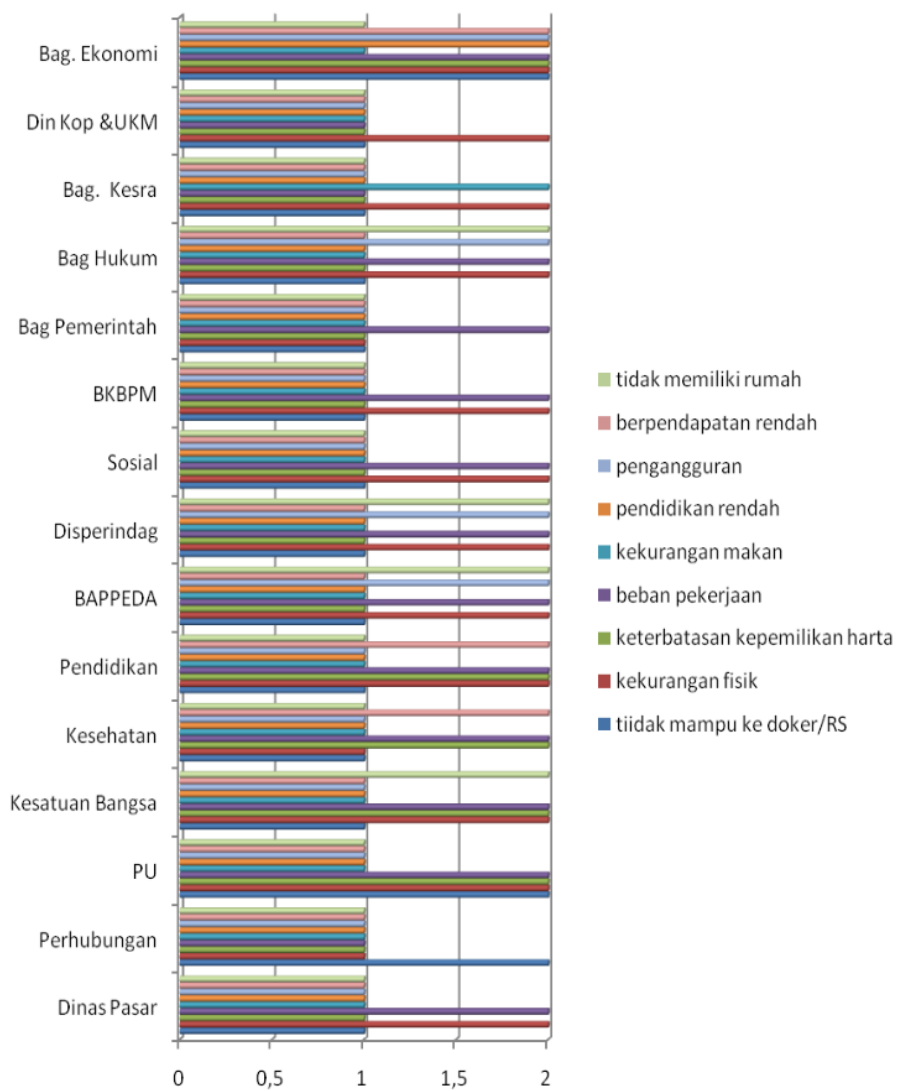
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Keputusan gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Malang.
4. Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kota dan Kabupaten.
5. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Malang yang didukung oleh komitmen dan program-program.

d. ANCAMAN

Ancaman yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Kondisi perekonomian nasional belum pulih sepenuhnya akibat krisis.
2. Program antar dinas terkait yang menangani kemiskinan masih tumpang tindih.
3. Perhatian pemerintah terhadap peran kaum perempuan dalam program penanggulangan kemiskinan masih rendah.
4. Terbukanya kota Malang sebagai kota tujuan para migrant sehingga kemiskinan mengalir ke kota Malang.

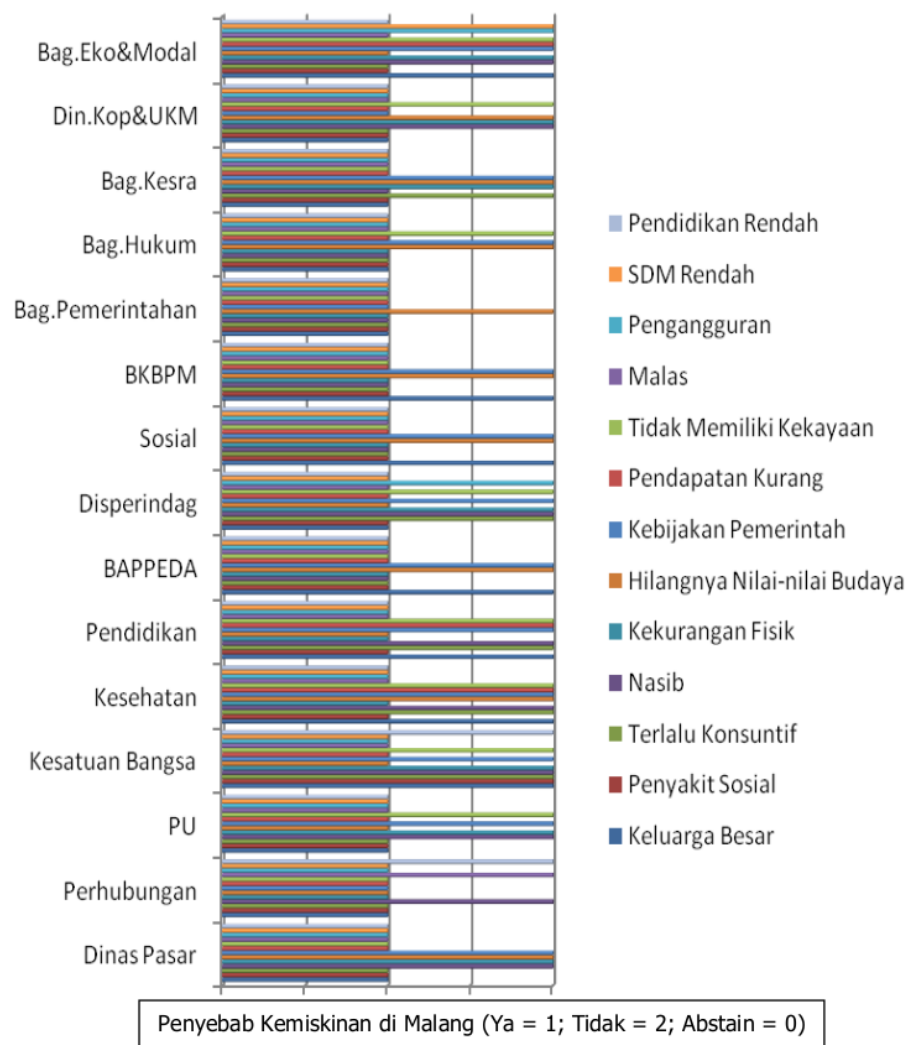
Selanjutnya hasil kajian yang dilakukan oleh tim SCBD menunjukkan bahwa dari 15 unit kerja / instansi / dinas yang dijadikan obyek kajian hanya beberapa instansi yang memiliki dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yaitu Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Masyarakat (BKBPM), Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, serta Bappeda.



Persepsi Kemiskinan (Ya = 1; Tidak = 2; Abstain = 0)

**Gambar 4.1** Persepsi Faktor Kemiskinan per SKPD kajian (N=15)





**Gambar 4.2** Persepsi Penyebab Kemiskinan per SKPD Kajian

Dari <sup>34</sup> **Gambar 4.1** dan **Gambar 4.2** di atas dapat digambarkan tentang 2 (dua) hal yaitu persepsi kemiskinan dan penyebab terjadinya kemiskinan dari perspektif unit kerja/dinas/SKPD kajian sebagai berikut:

- I. Persepsi tentang kemiskinan (makna miskin) dari jawaban terbanyak sampai terkecil adalah:

1. Kekurangan makan dan minuman (14 = 93.33%)
2. Pendidikan rendah (14 = 93.33%)
3. Pendapatan rendah (12 = 80%)
4. Tidak mampu kedokter/Rumah sakit (12 = 80%)
5. Pengangguran (11 = 73.33%)
6. Tidak memiliki rumah (11 = 73.33%)
7. Keterbatasan kepemilikan harta (10 = 66.66%)
8. Memiliki beban pekerjaan rumah tangga (3 = 20%)
9. Kekurangan fisik (3 = 20%)

II. Persepsi tentang penyebab kemiskinan dari jawaban terbanyak sampai terkecil yaitu:

1. Kualitas SDM rendah (13 = 86.66%)
2. Malas (14 = 93.33%)
3. Penyakit sosial (14 = 93.33%)
4. Pendidikan rendah (13 = 86.66%)
5. Pengangguran (13 = 86.66%)
6. Pendapatan kurang (12 = 80%)
7. Terlalu konsumtif (11 = 73.33%)
8. Keluarga besar dalam satu atap (8 = 53.33%)
9. Kekurangan fisik (8 = 53.33%)
10. Tidak memiliki kekayaan (7 = 46.66%)
11. Nasib (9 = 60%)
12. Hilangnya nilai-nilai budaya luhur (6 = 40%)
13. Kebijakan pemerintah (3 = 20%)

#### 4.2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERKAIT

Berikut ini diuraikan kegiatan yang dilakukan masing-masing instansi berkaitan dengan <sup>38</sup>kebijakan dan program-program penanggulangan <sup>47</sup>kemiskinan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)**

Pada tahun 2006 Bappeda telah melakukan kajian tentang strategi pengentasan kemiskinan yang hasilnya sudah baik dalam arti dapat dilanjutkan. Hanya saja kajian tentang program-program belum memasukkan perspektif gendernya.

**2. <sup>46</sup>Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM)**

Dalam struktur organisasi BKBPM yang menangani ada 2 bidang yaitu bidang yang menangani untuk masalah perempuan dan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.

Secara umum ada 4 bidang kegiatan yang dilakukan BKBPM tahun 2009 yaitu:

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kegiatan berkaitan dengan :
  - a. Fasilitas pemberdayaan perempuan PKK Kota Malang;
  - b. Pelatihan pemberdayaan gender di Kota Malang;
  - c. Fasilitas <sup>9</sup>pelayanan terpadu perlindungan anak dan perempuan Kota Malang; dan
  - d. Pelatihan peningkatan kemampuan dan ketrampilan dari bahan daur ulang;
2. Pembangunan Masyarakat dengan kegiatan berkaitan dengan:
  - a. Penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan Raskin;
  - b. Pelatihan ketrampilan aneka olahan pangan untuk masyarakat sekitar pabrik; dan
  - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Gardu Taskin;
3. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
5. Bidang Rutin.

Berdasarkan informasi dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BPM) ada kajian strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan

pada tahun 2005 namun belum sampai pada penyusunan kebijakan yang berperspektif gender. <sup>45</sup> Telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang mengacu pada Permendagri nomor 34 Tahun 2009 dimana susunan strukturnya sebagai berikut:

Ketua : Bappeda

Sekretaris : BKBPM dengan anggotanya adalah instansi terkait yaitu:

Dinas PU, Disperindag, Koperasi, Ketenagakerjaan dan Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Statistik, Bagian Kesra, Bagian Ekonomi dan PKK.

Selama ini TKPKD belum melakukan koordinasi secara maksimal antar dinas/instansi terkait dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bentuk program yang dilakukan berupa Raskin, BLT (uang), BOS (Pendidikan) dan Jamkesmas (Kesehatan) dalam pelaksanaannya masih ada yang belum sampai pada sasaran mengingat pemberian program pada keluarga miskin tidak *continue* dalam arti keluarga miskin penerima bantuan tidak menerima bantuan dari semua program. Contohnya, sebuah keluarga miskin mungkin dapat bantuan Raskin tapi tidak menerima bantuan uang, dan begitu seterusnya.

### **3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Tidak memiliki program penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender (BG). Hanya program dan kegiatan yang telah dilakukan termasuk netral gender karena belum sempat sampai mengkaji apakah program telah memperhatikan aspek partisipasi, akses, kontrol dan manfaat bagi kedua jenis kelamin. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah pembinaan dan peningkatan kerampilan desain kemasan, bordir dan amakan kripik. pelatihan kegiatan itu pernah melibatkan ibu-ibu PKK.

**4. Dinas Koperasi dan UKM**

Program khusus untuk penanggulangan kemiskinan belum, tetapi terdapat program yang diberikan langsung kepada koperasi-koperasi dan UKM, akan tetapi tidak memperhitungkan perempuan secara khusus.

**5. Bagian Perkonomian dan Penanaman Modal**

Program penanggulangan kemiskinan sudah ditangani oleh bagian BKBPM.

**6. Bagian Hukum**

Tidak memiliki program penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender.

**7. Bagian Pemerintahan**

Bagian ini memang tidak memiliki program penanggulangan kemiskinan berperspektif gender.

**8. Bagian Kesra**

Program-program yang dilakukan berupa pemberian peningkatan di bidang wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat umum sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berupa:

- a. Sosialisasi HIV/AIDS;
- b. Sosialisasi tentang Karang Werda; dan
- c. Sosialisasi *Trafficking*.

**9. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial**

Dinas ini memiliki kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

**10. Dinas Pendidikan**

Dinas ini telah memiliki program pengentasan kemiskinan yang berspektif gender yaitu adanya program BOS.

**11. Dinas Kesehatan**

Dinas ini sudah memiliki kebijakan dan program untuk menanggulangi kemiskinan yaitu program Jamkesmas tetapi program

yang khusus untuk meningkatkan taraf hidup perempuan dari segi ekonomi tidak tetapi dari segi kesehatan. Hal ini sesuai dengan tupoksinya.

**12. Dinas Pekerjaan Umum**

Dinas ini belum memiliki kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender, masih bersifat umum.

**13. Dinas Perhubungan**

Dinas ini belum memiliki kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender hal ini tergambarkan kalau ada kegiatan lapangan diberikan pada pegawai laki-laki dan pegawai perempuan ditempatkan pada posisi didalam.

**14. Dinas Pasar**

Dinas ini belum memiliki kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang berspektif gender.

**15. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**

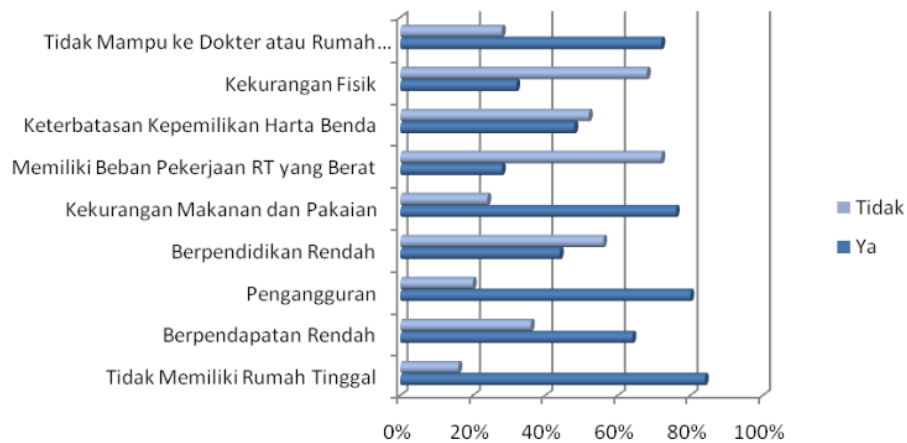
Tidak memiliki kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan disebabkan karena tidak ada dalam tupoksinya.

**16. Kecamatan dan Kelurahan (identifikasi persepsi konsep dan faktor penyebab kemiskinan)**

Dalam kajian ini diambil masyarakat yang ada di 5 kecamatan secara acak dan di 5 kelurahan yang masuk kategori memiliki Rumah Tangga Miskin menurut BPS tahun 2006. Pada tabel di bawah ini mencoba menggambarkan persepsi masyarakat tentang kemiskinan dan penyebab kemiskinan. Hal ini dilakukan karena dengan menggali persepsi masyarakat sendiri apa yang menurut mereka itu masuk kategori miskin dan hal-hal yang menjadi penyebab orang menjadi miskin dapat digabungkan antara persepsi masyarakat dengan hasil kajian para pakar. Hasilnya dapat dipakai sebagai dasar/rujukan untuk membuat suatu program yang sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

**Tabel 4.1** Persepsi Kemiskinan per Kecamatan

NO	KONDISI	KECAMATAN									
		KEDUNG KANDANG		SUKUN		KLOJEN		LOWOK WARU		BLIMBING	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
a.	Tidak Memiliki Rumah Tinggal	5	0	4	1	4	1	4	1	4	1
b.	Berpendapatan Rendah	3	2	5	0	3	2	2	3	3	2
c.	Pengangguran	5	0	4	1	4	1	4	1	3	2
d.	Berpendidikan Rendah	3	2	2	3	2	3	3	2	1	4
e.	Kekurangan Makanan dan Pakaian	5	0	5	0	1	4	5	0	3	2
f.	Memiliki Beban Pekerjaan RT yang Berat	2	3	3	2	2	3	0	5	0	5
g.	Keterbatasan Kepemilikan Harta Benda	2	3	3	2	3	2	1	4	3	2
h.	Kekurangan Fisik	2	3	1	4	2	3	3	2	0	5
i.	Tidak Mampu ke Dokter atau Rumah Sakit	5	0	5	0	3	2	4	1	1	4
	<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>27</b>



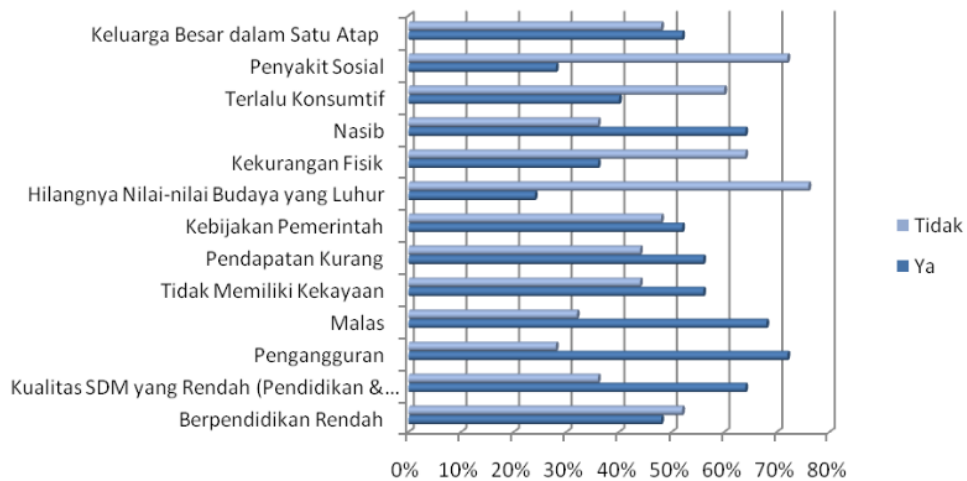
**Gambar 4.3** Persepsi Kemiskinan per Kecamatan

Pada **Tabel 4.1** persepsi masyarakat tentang kemiskinan per kecamatan menunjukkan bahwa yang masuk katagori miskin jawabannya mulai dari yang terbesar sampai terkecil sebagai berikut: Tidak memiliki rumah (21/84%), pengangguran (20/80%) dan berpendidikan rendah (11/44%), tidak mampu ke dokter/RS (18/72%), berpendapatan rendah (16/64%), keterbatasan kepemilikan harta (12/48%), kekurangan fisik (8/32%), dan memiliki beban pekerjaan rumah tangga (7/28%).



**Tabel 4.2** Penyebab Kemiskinan per Kecamatan

NO	KONDISI	KECAMATAN									
		KEDUNG KANDANG		SUKUN		KLOJEN		LOWOK WARU		BLIMBING	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
a.	Berpendidikan Rendah	3	2	2	3	2	3	2	3	3	2
b.	Kualitas SDM yang Rendah (Pendidikan & Ketrampilan)	4	1	1	4	4	1	3	2	4	1
c.	Pengangguran	5	0	3	2	4	1	3	2	3	2
d.	Malas	5	0	4	1	2	3	3	2	3	2
e.	Tidak Memiliki Kekayaan	5	0	4	1	2	3	1	4	2	3
f.	Pendapatan Kurang	2	3	5	0	2	3	3	2	2	3
g.	Kebijakan Pemerintah	2	3	3	2	4	1	3	2	1	4
h.	Hilangnya Nilai-nilai Budaya yang Luhur	0	5	1	4	2	3	2	3	1	4
i.	Kekurangan Fisik	4	1	1	4	2	3	2	3	0	5
j.	Nasib	4	1	3	2	3	2	0	5	2	3
k.	Terlalu Konsumtif	2	3	1	4	1	4	5	0	1	4
l.	Penyakit Sosial	1	4	2	3	1	4	4	1	0	5
m.	Keluarga Besar dalam Satu Atap	3	2	4	1	4	1	1	4	1	4
	<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>42</b>

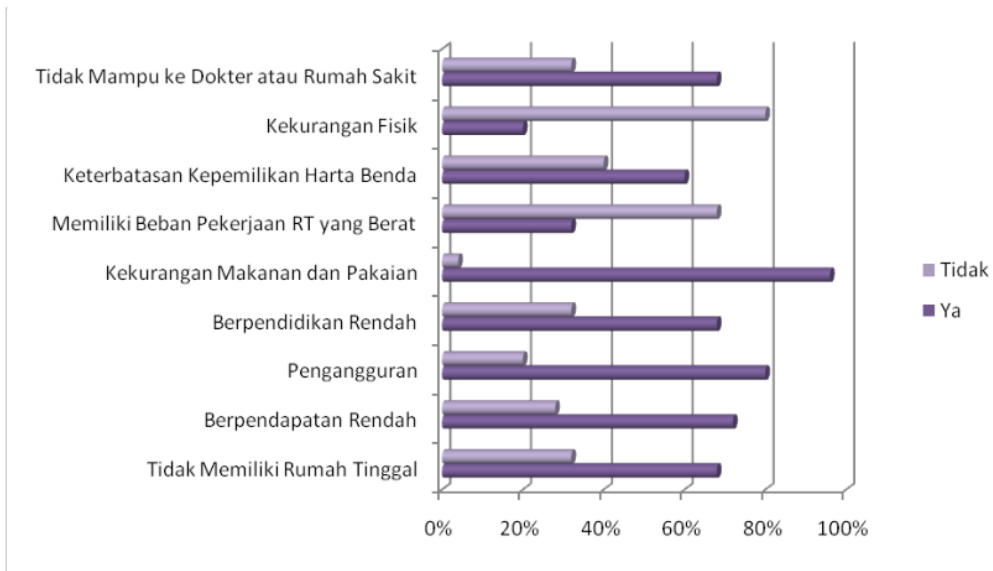


**Gambar 4.4** Penyebab Kemiskinan per Kecamatan

Pada **Tabel 4.2** Gambaran masyarakat per kecamatan tentang penyebab kemiskinan tergambar dengan urutan jawaban terbanyak sampai terkecil sebagai berikut: Pengangguran (72%), Nasib (64%), Kualitas SDM (64%), Pendapatan Kurang (56%), Tidak memiliki kekayaan (56%), Keluarga Besar (52%), Kebijakan pemerintah (52%), Fisik (36%), Berpendidikan Rendah (48%), Terlalu konsumtif (40%), Penyakit Sosial (28%), Hilangnya nilai-nilai budaya yang luhur (24%).

**Tabel 4.3** Persepsi Kemiskinan per Kelurahan

NO	KONDISI	KELURAHAN									
		TANJUNG REJO		TLOGO MAS		CEMORO KANDANG		PANDAN WANGI		SAMAAN	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
a.	Tidak Memiliki Rumah Tinggal	4	1	3	2	2	3	4	1	4	1
b.	Berpendapatan Rendah	4	1	5	0	2	3	5	0	2	3
c.	Pengangguran	4	1	3	2	4	1	4	1	5	0
d.	Berpendidikan Rendah	4	1	3	2	4	1	3	2	3	2
e.	Kekurangan Makanan dan Pakaian	5	0	5	0	5	0	5	0	4	1
f.	Memiliki Beban Pekerjaan RT yang Berat	2	3	3	2	2	3	1	4	0	5
g.	Keterbatasan Kepemilikan Harta Benda	5	0	3	2	2	3	3	2	2	3
h.	Kekurangan Fisik	2	3	2	3	0	5	1	4	0	5
i.	Tidak Mampu ke Dokter atau Rumah Sakit	5	0	2	3	4	1	4	1	2	3
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>23</b>

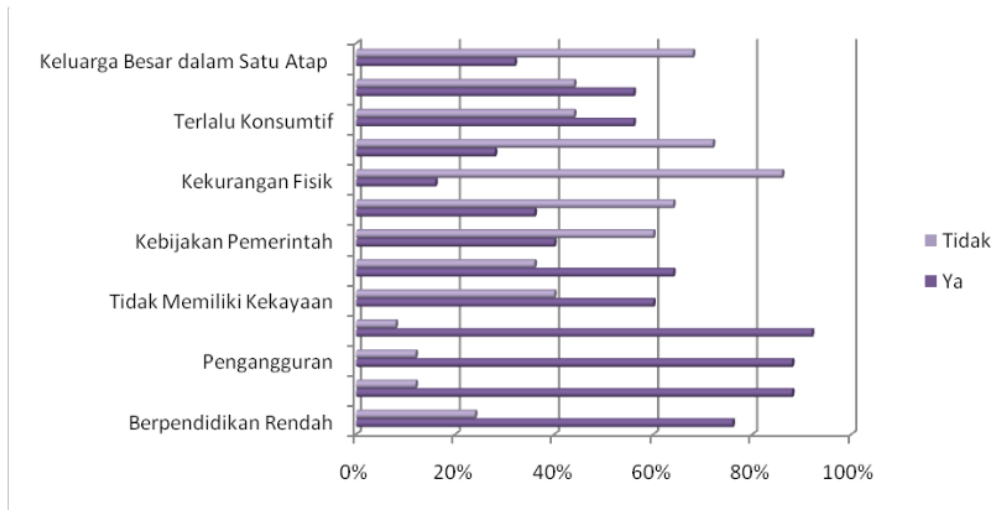


**Gambar 4.5** Persepsi Kemiskinan per Kelurahan

Pada **Tabel 4.3** tentang persepsi masyarakat tentang kemiskinan per Kelurahan menunjukkan sebagai berikut: Kekurangan makanan dan pakaian (96%), Pengangguran (80%), Berpendapatan rendah (72%), Tidak mampu ke dokter atau rumah sakit (68%), Tidak memiliki rumah tinggal (68%), Berpendidikan rendah (68%), Keterbatasan kepemilikan harta benda (60%), Memiliki beban pekerjaan RT yang berat (32%), Kekurangan fisik (20%).

**Tabel 4.4** Penyebab Kemiskinan per Kelurahan

NO	KONDISI	KELURAHAN									
		TANJUNG REJO		TLOGO MAS		CEMORO KANDANG		PANDAN WANGI		SAMAAN	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
a.	Berpendidikan Rendah	4	1	5	0	5	0	3	2	2	3
b.	Kualitas SDM yang Rendah (Pendidikan & Ketrampilan)	5	0	5	0	5	0	3	2	4	1
c.	Pengangguran	4	1	5	0	5	0	4	1	4	1
d.	Malas	5	0	4	1	5	0	5	0	4	1
e.	Tidak Memiliki Kekayaan	5	0	1	4	1	4	4	1	4	1
f.	Pendapatan Kurang	5	0	2	3	2	3	4	1	3	2
g.	Kebijakan Pemerintah	3	2	2	3	2	3	0	5	3	2
h.	Hilangnya Nilai-nilai Budaya yang Luhur	2	3	3	2	3	2	0	5	1	4
i.	Kekurangan Fisik	2	3	1	4	1	4	0	5	0	5
j.	Nasib	3	2	2	3	2	3	0	5	0	5
k.	Terlalu Konsumtif	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2
l.	Penyakit Sosial	3	2	3	2	4	1	2	3	2	3
m.	Keluarga Besar dalam Satu Atap	4	1	1	4	1	4	2	3	0	5
	<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>35</b>



**Gambar 4.6** Penyebab Kemiskinan per Kelurahan

43

Berdasarkan **Tabel 4.4** dan **Gambar 4.6** tentang persepsi penyebab kemiskinan menurut masyarakat per kelurahan dapat digambarkan sebagai berikut: Malas (92%), Kualitas SDM (92%), Pengangguran (88%), Berpendidikan rendah (76%), Pendapatan kurang (64%), Tidak memiliki kekayaan (60%), Penyakit sosial (56%), Terlalu konsumtif (56%), Kebijakan Pemerintah (40%), Hilangnya nilai budaya yang luhur (36%), Keluarga besar dalam satu atap (32%), Nasib (28%) dan Kekurangan fisik (16%).

Setelah mengamati hasil kajian yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang kemiskinan terungkap bahwa kategori orang miskin adalah:

1. Tidak memiliki rumah tinggal;
2. Pengangguran;
3. Kekurangan makan dan minum;
4. Berpendidikan rendah;
5. Tidak mampu kerumah sakit/dokter; dan
6. Berpendapatan rendah.

Dibandingkan dengan persepsi dari dinas/SKPD terkait terungkap bahwa makna orang miskin itu adalah:

1. Kekurangan makan dan minuman;
2. Tidak mampu kedokter/rumah sakit;
3. Pendapatan rendah;
4. Keterbatasan harta;
5. Pendidikan rendah;
6. Tidak memiliki rumah;
7. Pengangguran.

Jika dikaitkan dengan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan dari aspek pemenuhan hak-hak dasar meliputi:

1. Aspek kecukupan pangan;
2. Aspek kesehatan;
3. Aspek perumahan;
4. Aspek Pendidikan;
5. Aspek kesempatan kerja/usaha.

Rencana program aksi penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tinggal mengintegrasikan aspek gender ke dalam setiap kebijakan dan program-program yang akan dibuat. Jika indikator di atas dipakai sebagai bahan untuk membuat program-program penanggulangan kemiskinan maka ke depan bagaimana mengurangi pengangguran dan aspek pendidikan di masyarakat perlu dijadikan pertimbangan yang serius. Jika masyarakat memiliki lapangan pekerjaan, kondisi pendidikan dan kesehatan diperbaiki maka kondisi kemiskinan lainnya dapat diperbaiki. Selain BKBPM, SKPD di Pemerintah Kota Malang yang relevan melakukan kajian dan program-program penanggulangan kemiskinan adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.

Keterkaitan masing-masing instansi dalam melaksanakan program dan relevansinya menunjukkan bahwa dari semua instansi yang menjadi obyek kajian ternyata tidak semua memiliki program penanggulangan

kemiskinan yang berperspektif gender. Sehingga hubungan antar instansi/SKPD satu dengan yang lainnya belum komprehensif baik dalam membuat dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, ke depan beberapa dinas yang perlu melakukan program penanggulangan kemiskinan berperspektif gender tidak hanya BKBPM tetapi melibatkan dinas lainnya yaitu dinas pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja dan sosial.

#### **4.3. PERMASALAHAN UMUM**

Berdasarkan hasil kajian dari Bappeda pada tahun 2006 secara umum permasalahan pada **kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang selama ini sudah ada.** Hanya yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan program dan kebijakan tersebut adalah perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan isu gender komprehensif guna penanggulangan kemiskinan yang melibatkan masyarakat miskin itu sendiri, karena kebijakan berperspektif gender secara eksplisit belum ada. Selanjutnya perlu adanya sinergi antar satuan kerja dalam rangka penanggulangan permasalahan kemiskinan di daerah. Proses penanggulangannya juga ditekankan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin secara maksimal bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Upaya penanggulangan kemiskinan hendaknya memperhatikan rasa keadilan dan kesetaraan gender, sebab jika dilihat dari jumlah masyarakat miskin umumnya didominasi oleh perempuan.

#### **4.4. PERMASALAHAN PADA SKPD-SKPD TERKAIT**

Dari hasil kajian yang telah dilakukan pada SKPD terkait, ternyata ada permasalahan yang ditemui dimana tidak semua instansi/dinas memiliki kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan apalagi kebijakan yang berperspektif gender. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam mendefinisikan program yang menyangkut kewenangan maka kedepan perlu dibuat suatu kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan yang



berperspektif gender sehingga dapat dipakai sebagai dasar rujukan bagi SKPD terkait.

#### **4.5. MANFAAT KAJIAN BAGI SETIAP SKPD/ PEMERINTAH KOTA MALANG**

Adapun manfaat kajian ini bagi setiap SKPD yang terkait dalam menangani dan melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya landasan kebijakan maka akan dapat dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan program-program sehingga dampak dari program akan dirasakan oleh kedua jenis kelamin secara tepat;
- b. Selanjutnya adanya pola kerja yang terpadu antar instansi terkait sehingga program-program dapat dilakukan dan mencapai sasaran secara tepat dan benar;
- c. Dengan diintegrasikannya konsep PUG maka <sup>8</sup> mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu substansi kebijakan dan program yang dibuat agar mencerminkan kebutuhan-kebutuhan, harapan, dan keinginan-keinginan kedua jenis kelamin yang nota bene berbeda.

#### **4.6. OUTCOME YANG DIHARAPKAN**

Dengan tersusunnya kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender maka program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot Malang akan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan terpadu sehingga dapat menurunkan tingkat dan jumlah masyarakat miskin di wilayah Kota Malang sekaligus meningkatkan kapasitas perempuan.

#### **4.7. KENDALA IMPLEMENTASI**

Adapun kendala-kendala atau hambatan yang mungkin akan ditemui antara lain, yaitu:

- a. Belum tersedianya landasan hukum/kebijakan sebagai dasar rujukan bagi instansi/dinas terkait dalam melaksanakan program/proyek penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender;
- b. Ketidaksiapan SDM akan pemahaman tentang konsep-konsep gender khususnya konsep PUG;
- c. Komitmen antar instansi/dinas/SKPD dalam melaksanakan program-program seperti kurangnya koordinasi antar instansi/dinas.

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI****5.1 KESIMPULAN**

Dari hasil kajian tentang Penyusunan Kerangka Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang belum memiliki kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang berwawasan gender. Akan tetapi hasil kajian menunjukkan bahwa adanya persepsi yang serupa tentang Makna Miskin dan Penyebab kemiskinan dari perspektif SKPD dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya faktor yang positif karena akan bermanfaat dalam pembuatan materi program penanggulangan kemiskinan.
2. Hanya beberapa dinas /SKPD yang memiliki dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat. Sedangkan dinas-dinas yang lainnya melaksanakan program sebatas yang tertera dalam Tupoksinya. Sehingga keterkaitan masing-masing instansi dalam melaksanakan program dan relevansinya menunjukkan bahwa koordinasi antar SKPD dalam mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan secara umum belum maksimal.
3. Strategi penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan hasilnya belum maksimal karena lemahnya koordinasi antara SKPD yang memiliki program kemiskinan, mulai dari perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan program-program. Lebih lanjut strategi penanggulangan kemiskinan yang responsif gender belum ada.

**5.2 REKOMENDASI**

Setelah melakukan studi tentang penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan berperspektif gender maka dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah Kota Malang perlu memiliki kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender. Bentuknya dapat berupa Surat Keputusan Walikota atau Perda.
2. Perlunya peningkatan kapasitas tentang materi pengarusutamaan gender melalui diklat-diklat di kalangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Malang mulai dari level staaf sampai pengambil kebijakan.
3. Didalam membuat kebijakan, program-program penanggulangan kemiskinan yang berwawasan gender perlu dilakukan koordinasi diantara SKPD SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang selain BKBPM, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Tenaga Kerja dan Sosial, Kimpraswil. Hal ini sesuai dengan ketentuan <sup>33</sup> dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, sehingga dapat diketahui sejauhmana Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan Inpres tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Biro Pusat Statistik Kota Malang, 2006

Derbyshire, 2002 . Gender Manual: Practical Guidelines for Development Policy Makers and Practitioners.

Gender and Water Development Report. 2003, hal 30 dan UN Economic and Social Council 1997).

Konferensi Wanita se-Dunia di Beijing 1995.

### Peraturan Perundang-Undangan

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas <sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

<sup>16</sup> Instruksi Presiden (INPRES) nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota dan Kabupaten;

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan;

Surat Edaran (SE) Depdagri dan Otda RI Nomor 050/1240/ii/Bangda.

## ORIGINALITY REPORT

---

<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>4%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>ayokesini.com</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>es.scribd.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>masgackt.blogspot.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>kingkongsuroto.blogspot.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>suyatno.blog.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>www.yumpu.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>docslide.us</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

---

10

[pt.scribd.com](https://pt.scribd.com)

Internet Source

<1%

11

[docplayer.info](https://docplayer.info)

Internet Source

<1%

12

[fajar.co.id](https://fajar.co.id)

Internet Source

<1%

13

[wisatamalang.myblogrepublika.com](https://wisatamalang.myblogrepublika.com)

Internet Source

<1%

14

[pustaka.unpad.ac.id](https://pustaka.unpad.ac.id)

Internet Source

<1%

15

[sjdih.sidoarjokab.go.id](https://sjdih.sidoarjokab.go.id)

Internet Source

<1%

16

[dishubkabmtb.blogspot.com](https://dishubkabmtb.blogspot.com)

Internet Source

<1%

17

[eprints.ulm.ac.id](https://eprints.ulm.ac.id)

Internet Source

<1%

18

[mojokertokab.go.id](https://mojokertokab.go.id)

Internet Source

<1%

19

[repository.unand.ac.id](https://repository.unand.ac.id)

Internet Source

<1%

20

[id.scribd.com](https://id.scribd.com)

Internet Source

<1%

21

[urbandepan.blogspot.com](https://urbandepan.blogspot.com)

Internet Source

<1%

---

22

[lemlit.um.ac.id](http://lemlit.um.ac.id)

Internet Source

<1%

---

23

[acehprov.go.id](http://acehprov.go.id)

Internet Source

<1%

---

24

[bppp.kemendag.go.id](http://bppp.kemendag.go.id)

Internet Source

<1%

---

25

[www.jdih.setjen.kemendagri.go.id](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id)

Internet Source

<1%

---

26

[imeldasndynt.blogspot.com](http://imeldasndynt.blogspot.com)

Internet Source

<1%

---

27

[www.unisosdem.org](http://www.unisosdem.org)

Internet Source

<1%

---

28

[eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id)

Internet Source

<1%

---

29

[file.upi.edu](http://file.upi.edu)

Internet Source

<1%

---

30

[balitbangda.balangankab.go.id](http://balitbangda.balangankab.go.id)

Internet Source

<1%

---

31

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

<1%

---

32

[pro-edukasi.com](http://pro-edukasi.com)

Internet Source

<1%

---

33

[vdocuments.site](http://vdocuments.site)



Internet Source

<1%

34

[jurnal.perbanas.id](http://jurnal.perbanas.id)

Internet Source

<1%

35

[tiyasamalia.blogspot.com](http://tiyasamalia.blogspot.com)

Internet Source

<1%

36

[koleksidataskripsi.blogspot.com](http://koleksidataskripsi.blogspot.com)

Internet Source

<1%

37

[www.paserkab.go.id](http://www.paserkab.go.id)

Internet Source

<1%

38

[www.neliti.com](http://www.neliti.com)

Internet Source

<1%

39

Moh Taufik, Imawan Sugiarto. "Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal", Diktum : Jurnal Ilmu Hukum, 2019

Publication

<1%

40

[journal.unnes.ac.id](http://journal.unnes.ac.id)

Internet Source

<1%

41

[ellykristiani.wordpress.com](http://ellykristiani.wordpress.com)

Internet Source

<1%

42

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

<1%

43

[docobook.com](http://docobook.com)

---

Internet Source

<1%

---

44

[www.meridiancody.com](http://www.meridiancody.com)

Internet Source

<1%

---

45

[issuu.com](http://issuu.com)

Internet Source

<1%

---

46

[hendrosuyoto.blogspot.com](http://hendrosuyoto.blogspot.com)

Internet Source

<1%

---

47

[bappelitbangda.majalengkakab.go.id](http://bappelitbangda.majalengkakab.go.id)

Internet Source

<1%

---

48

[anzdoc.com](http://anzdoc.com)

Internet Source

<1%

---

49

[fr.scribd.com](http://fr.scribd.com)

Internet Source

<1%

---

50

[www.kalbar.go.id](http://www.kalbar.go.id)

Internet Source

<1%

---

51

[edoc.site](http://edoc.site)

Internet Source

<1%

---

52

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

<1%

---

53

[jatimtimes.com](http://jatimtimes.com)

Internet Source

<1%

---

54

[www.tanggamus.go.id](http://www.tanggamus.go.id)

Internet Source

<1%

---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography      On

Exclude matches      Off